

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Seluruh jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintah daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat sekaligus sebagai pelaksana program pemerintah.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, hal ini ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan bewibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan dari masyarakat itu timbul karna ada sebabnya, yaitu praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan

sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Selain itu, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Berdasarkan fungsi-fungsi dasar manajemen, Ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Dan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di kutip dari (Nusantaranews86.com Rabu, 7 November 2018) ditemukan adanya indikasi KKN dalam pengadaan obat-obatan Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kemudian di tahun 2018 terapat juga kasus Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, ia terkena OTT KPK pada Oktober 2018 terkait dugaan korupsi perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, dikutip dari (<http://metro.tempo.co> Senin, 22 Oktober 2018).

Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (selanjutnya di singkat dengan Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hal-hal yang telah penulis kemukakan diatas mendorong dan memotifasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap kualitas audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Bekasi yang perlu didukung dengan faktor-faktor yang memadai oleh sebab itu penulis memilih judul penelitian **“Pengaruh Faktor Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dalam meningkatkan Kinerja Inspektorat Kota Bekasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas audit dalam meningkatkan Kinerja Inspektorat Kota Bekasi?
2. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas audit dalam meningkatkan Kinerja Inspektorat Kota Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas audit dalam meningkatkan Kinerja Inspektorat Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui apakah Indenpensi berpengaruh positif terhadap Kualitas audit dalam meningkatkan Kinerja Inspektorat Kota Bekasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit demi menunjang peningkatan kinerja inspektorat serta untuk mengembangkan dan

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada didalam dunia kerja.

2. Bagi Inspektorat, sebagai bahan kajian sumbangan pemikiran tentang kualitas auditor dan pelatihan yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja auditor Inspektorat Kota Bekasi dimasa yang akan datang.
3. Bagi Akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian – penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat menjadi bahan referensi penelitian yang akan meneliti hal yang sama.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar lebih terarah dan jelas penelitian ini, maka batasan aspek dalam penelitian ini yakni tentang kualitas auditor khususnya aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan faktor – faktor yang mempengaruhinya yakni yang hanya dibatasi khususnya pada kompetensi dan independensi Auditor pada Inspektorat Kota Bekasi.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka yang mencakup landasan teori dan pengembangan hipotesis berisi tentang teori – teori yang relevan digunakan untuk mendukung proses penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang terdiri dari populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, pemilihan variabel dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB VI : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian merupakan bab yang berisi tentang profil Inspektorat Kota Bekasi, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

Penutup merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan implikasi manajerial berupa saran-saran untuk Inspektorat dan peneliti selanjutnya serta keterbatasan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

